

Pemahaman Kader PKK terhadap Panca Dharma Wanita dalam Konteks *Critical Discourse Analysis*¹

Dwi Wulandari, S.S, M.A & Mytha Candria, S.S., M.A., M.A
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro)

Abstract

Panca Dharma Wanita (Women Five Roles) is one of the texts that is always recited by the member of PKK (Empowerment of Family Welfare) every time they hold meetings. This text contains the concepts underlined their position and roles in the family and in the society. This concept is embraced without much resistance for more than three decades. This research is aimed at figuring out the power domination revealed in the text through Critical discourse Analysis approach. The research subjects are the women of the members of PKK in RW 1 Bangetayu Wetan village, Genuk Semarang. Purposive sampling is chosen by considering the different background of the respondents, which include their and their husband's education background, jobs, and the size of their family. Data are collected by using interview method.

The research shows that all of the women in the study know exactly their role and function in their family life. However, they are not aware that their role and functions are the subordinates ones, as their freedom and rights are constraint by the existence of their husband. One of the reasons of this unawareness is that women consider their husband (men) as having higher position, roles, and function than women.

Within the frame of CDA, Panca Dharma Wanita contains the ideas of power domination, in other words, Panca Dharma puts the women within their domestic roles only by focusing on housewifization and "motherism". Those two areas are not negotiable or like it or not, the women must fulfil those functions unless they preferred to be judged as not being women. Once the women are allowed to involve themselves in public domain, they are not proudly supported because there are some norms that may "constraints" women's role, such as they must get their husband's permission, and if they are proven to be more successful than their husbands, they must be humble and respect their husband as always. Furthermore, Panca Dharma Wanita suggests women that they may involve themselves in public arena only when they have finished handling their domestic business.

Key words: Panca Dharma Wanita, PKK, dominasi power, hegemoni

¹ Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Budaya di Pantai Utara Jawa. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Diponegoro. 2012

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Panca Dharma Wanita adalah salah satu *text* yang senantiasa dilafadzkan oleh kader penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada setiap pertemuan, disamping Mars PKK dan Mars KB yang senantiasa dilagukan. Secara literal, Panca Dharma Wanita berarti lima pengabdian perempuan yang isinya sebagai berikut:

1. Wanita sebagai istri pendamping suami
2. Wanita sebagai ibu penerus keturunan
3. Wanita sebagai pengurus rumah tangga
4. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
5. Wanita sebagai anggota warga negara

Kelima dharma tersebut menjadi suatu bentuk doktrin yang keberlangsungannya senantiasa dijaga dalam organisasi kewanitaan yang bersifat pendukung suami, seperti Dharma Wanita ataupun PKK (Rahayu, 2004). Menurut Rahayu (2004), Panca Dharma Wanita dirancang dan dijadikan landasan filosofi bagi organisasi-organisasi perempuan pendukung karir suami, seperti Dharma Pertiwi (organisasi istri TNI) dan Dharma Wanita (organisasi istri pegawai pemerintah). Kedua organisasi tersebut memang mendasarkan kegiatannya pada tiga prinsip utama, yaitu pengabdian sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai ibu bangsa.

Tahun 1984, PKK dibentuk untuk mewadahi, memobilisasi, dan mengendalikan kaum perempuan yang bukan menjadi istri ABRI atau pegawai pemerintah. Ketika Panca Dharma Wanita dijadikan sebagai landasan filosofi PKK, maka sebenarnya PKK dijadikan sebagai organisasi yang sama dengan Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita. Padahal, secara kontekstual ada sekian banyak perbedaan yang melatarbelakanginya ó misalnya para wanita ini belum tentu bersuamikan laki-laki yang bekerja tetap ó sehingga Panca Dharma wanita menjadi doktrin yang belum tentu sesuai untuk dijadikan landasan filosofinya.

Dengan demikian, penulis berniat untuk melakukan kajian mengenai Panca Dharma Wanita dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis* sebagai pendekatan.

Lebih jauh lagi, satu hal yang juga penting adalah bagaimana para kader PKK memahami konsep Panca Dharma Wanita tersebut. Selama lebih dari tiga dekade Panca Dharma ini menjadi landasan kegiatan mereka tanpa adanya resistansi yang berarti. Asumsinya adalah konsep ini dipahami selaras dengan kehidupan para kader dan oleh karenanya bisa diterima dengan baik. Dengan demikian, perlu kiranya untuk melihat apakah asumsi tersebut benar adanya melalui penelitian yang akan penulis lakukan ini.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berikut:

1. Apakah konsep Panca Dharma Wanita merupakan alat dominansi *power* dalam konteks *Critical Discourse Analysis*?
2. Bagaimana pemahaman para kader penggerak PKK terhadap konsep Panca Dharma Wanita?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui apakah konsep Panca Dharma Wanita merupakan alat dominansi *power* dalam konteks *Critical Discourse Analysis*;
2. untuk mengetahui bagaimana pemahaman para kader penggerak PKK terhadap konsep Panca Dharma Wanita.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan dua hal penting, yakni mengetahui bagaimana dominasi kekuasaan tercermin dalam Panca Dharma Wanita, dan mengetahui pemahaman kader penggerak PKK terhadap konsep Panca Dharma Wanita. Dua hasil utama dari penelitian ini akan memberi tambahan wawasan mengenai isu persamaan derajat laki-laki dan perempuan di Indonesia. Tidak

hanya dengan melihat bagaimana makna sejati dari suatu konsep yang sudah melembaga, penelitian ini juga akan melihat pemaknaan konsep tersebut oleh para pelakunya sendiri, dalam hal ini adalah para kader PKK yang secara aktif mengikuti kegiatan PKK dan memobilisasi warga untuk ikut terlibat dalam gerakan PKK.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Critical Discourse Analysis(CDA), yang merupakan kajian multidisipliner terhadap dominasi kekuasaan dalam wacana (*discourse*), banyak digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Ekomadyo (2006) meneliti media arsitektur^o seperti majalah, iklan *real estat*, dan lain-lain^o dengan metode analisis isi (*content analysis*). Studi ini bertujuan mendapatkan struktur makna teks-teks media arsitektur tersebut. Namun, penelitian ini tidak menunjukkan apa hasil analisis terhadap media arsitektur tersebut, dan lebih banyak mengulas tentang apa yang diharapkan bisa dilakukan dan dihasilkan dari penelitian yang menggunakan metode analisis isi.

Penelitian lain dilakukan oleh Wodak (1991) yang mengkaji anti-semitisme pasca perang Austria. Dengan tujuan mengetahui mekanisme pelebagaan konsep anti Yahudi di Austria, Wodak meneliti beberapa faktor yang terkait dengan diskursus anti Yahudi, termasuk setting, peserta tutur, topik, dan emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui ekspresi-ekspresi syak wasangka, wacana privat dan publik di Austria memang menunjukkan adanya anti-Yahudi. Namun demikian, seberapa langsung dan eksplisitnya ekspresi tersebut berbeda berdasarkan konteksnya.

Kajian CDA terhadap ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) antara lain terdapat dalam *Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology in discourse*, yang merupakan kumpulan tulisan para feminis terhadap ketidaksetaraan sosial yang sengaja dipertahankan dalam pemakaian bahasa.

Ketidaksetaraan sosial yang disajikan dalam buku ini sangat beragam, bukan saja yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga yang terjadi di Singapura, Selandia Baru, Spanyol, serta Hungaria (dalam Cameron, 2007).

2.2. Critical Discourse Analysis(CDA)

Critical Discourse Analysis atau CDA, menurut van Dijk (1998), memiliki sejarah cukup panjang. Beberapa prinsip dasar CDA dapat ditemukan dalam Teori Kritis Aliran Frankfurt (*the Critical Theory of the Frankfurt School*) sebelum perang Dunia Kedua. Sementara itu, fokus CDA pada bahasa serta wacana diinisiasi oleh linguistik kritis *critical linguistics* yang muncul pada akhir tahun 1970-an di Inggris dan Australia. CDA, lanjut van Dijk (1998, hal. 1), merupakan reaksi kritis terhadap paradigma keilmuan tahun 1960-1970-an yang cenderung bersifat formal, asosial, dan tidak kritis.

Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan kajian multidisipliner yang berfokus pada hubungan antara bahasa, masyarakat, kekuasaan, identitas, politik, dan budaya (Rahimi & Riasati, 2011). CDA mengkaji bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan dilakukan, direproduksi, atau ditentang dalam teks serta percakapan/ perbincangan dalam konteks sosial politik (van Dijk, 1998). CDA, selain bertujuan meneliti, menelaah dan mengkritisi agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dalam bahasa, teks dan wacana, juga bertujuan menunjukkan serta menolak ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat: *With such dissident research, critical discourse analysts take explicit position, and thus want to understand, expose and ultimately to resist social inequality* (van Dijk, 1998, hal. 1).

Karena konsepnya yang sedemikian luas, maka kajian dengan CDA bisa dilakukan pada banyak teks dari berbagai cabang ilmu. Sebagai bagian dari kajian linguistics, CDA memberi keleluasaan bagi ahli bahasa untuk melihat data secara lebih komprehensif. Data yang dikaji bisa berupa wawancara, fokus group, dokumen dan catatan, percakapan yang terjadi secara natural, pidato politis, artikel koran, kartun, juga novel (Philips & Hardy, 2002). Lebih jauh lagi Fairclough (1995) menyatakan bahwa teks atau discourse yang secara general

diartikan sebagai segala bentuk data ó tidak hanya memiliki makna literal, tetapi merupakan sebuah konteks sosial dimana terdapat dua proses sosial yang mendasar yakni ...*öcognition and representation of the world, and social interaction*ö(Fairclough, 1995, hal. 6). Dengan demikian, teks bisa memiliki banyak makna yang bisa dikaji dalam bermacam konteks.

Salah satu presuposisi dalam CDA adalah pemahaman tentang sifat kekuasaan sosial (*social power*) dan dominasi (van Dijk, 1993). Dalam dimensi sosial, kekuasaan sosial bisa bermaksud kemampuan seseorang untuk mendapatkan sumber-sumber kemudahan, seperti kemakmuran, pendidikan, dan lain sebagainya. Secara langsung kekuasaan sosial terkait dengan kontrol sosial, karena mereka yang memiliki kekuasaan sosial dapat men-*dominasi* (memegang kontrol sosial). Oleh sebab itu, CDA juga perlu untuk memfokuskan diri pada strategi pelegitimasi kontrol yang biasanya terlembagakan (van Dijk, 1993).

Penelitian yang menggunakan kerangka teoretis *Critical Discourse Analysis*, tulis Fairclough (2001, hal. 21-22, 90), mesti melalui tiga tahap analisis yang melibatkan tiga elemen wacana (teks, interaksi, dan konteks). Ketiga tahap analisis ini mencakup (1) mendeskripsikan *öteksö* (*describing formal properties of the text*), (2) menafsirkan (*interpreting*) hubungan *öteksö* dengan *öinteraksiö*, serta (3) menjelaskan (*explanation*) relasi antara *öinteraksiö* dengan *ökonteks sosialö*.

Dalam hal ini, Fairclough (2001) membedakan antara *öteksö* dan *öwacanaö*. *öTeksö* merupakan hasil akhir proses produksi, sedangkan *öwacanaö* (*discourse*) adalah keseluruhan proses interaksi sosial itu sendiri. Salah satu hasil proses interaksi sosial ini adalah *öteksö*.

öInteraksiö berkaitan dengan *proses*, yang terdiri dari *proses produksi* dan *proses interpretasi*. Dalam kedua proses ini, teks memegang peranan yang sama pentingnya. Dalam proses produksi, teks merupakan *hasil akhir* proses itu sendiri. Sementara itu, dalam proses interpretasi, teks berfungsi sebagai *sumber*. Unsur-unsur formal sebuah teks merupakan *jejak* (*traces*) proses produksi sekaligus *kunci* (*cues*) dalam proses interpretasi.

Proses produksi dan interpretasi, jelas Fairclough (2001), melibatkan teks dan MR (*member's resources*)². MR, yang secara literal berarti sumber daya anggota, mengacu pada pengetahuan seseorang seputar realitas hidupnya, yang mencakup pengetahuan tentang bahasa, alam, serta kehidupan sosial (termasuk norma dan nilai sosial, kepercayaan, dsb.)

Elemen wacana ketiga, yaitu konteks, lebih diarahkan pada *konteks sosial*, seperti yang dinyatakan Fairclough (2001), bahwa proses produksi dan interpretasi tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dengan mengabaikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Jadi, wacana (*discourse*) mencakup kondisi sosial (*social conditions*) yang terdiri dari kondisi sosial produksi (*social conditions of production*) dan kondisi sosial interpretasi (*social conditions of interpretation*). Kondisi sosial ini kemudian terkait dengan tiga tingkat organisasi sosial (Fairclough, 2001, hal. 20-21):

- a) *The level of the social situation*, atau lingkungan sosial terjadinya wacana
- b) *The level of the social institution*, yang merupakan matriks lebih luas yang mempengaruhi sebuah wacana
- c) *The level of the society*, atau tingkat masyarakat secara keseluruhan

2.3. Perempuan Indonesia Dalam Distribusi Kekuasaan

Pembahasan seputar ketimpangan peran dan posisi perempuan Indonesia di berbagai bidang serta upaya menyatakannya memang bukanlah hal baru (Hatley, 2002, 2008; Marcoes, 2002; Oey-Gardiner, 2002). Penolakan terhadap ketidakadilan yang dihadapi perempuan Indonesia sebenarnya telah mulai dilakukan oleh Kartini (1879-1904) pada abad ke-19. Pemikiran serta perjuangan Kartini, yang tergolong sangat progresif pada masa itu, diterbitkan oleh sahabat penanya, Abendanon, dalam kumpulan korespondensi Kartini *Habis gelap terbitlah terang*.

²*Member resources* (MR), yang digunakan untuk memproduksi atau menafsirkan teks, bersifat kognitif, karena MR tersimpan dalam otak (kepala) seseorang. Namun, MR juga bersifat sosial, sebab MR berasal dari realitas serta relasi sosial yang dialami anggota-anggota masyarakat (Fairclough, 2001).

Sayangnya, meski semangat menyejajarkan kedudukan perempuan telah disemai Kartini sejak abad ke-19, dan gerakan penyetaraan perempuan sudah mulai dilakukan secara terarah sejak awal tahun 1980-an melalui berbagai organisasi perempuan dengan tujuan yang beragam³ mulaidari penghilangan kekerasan dalam rumah tangga sampai penyetaraan peran dan fungsi perempuan (Rahayu, 2004)³ perempuan Indonesia masih terus terdiskriminasi di berbagai sektor. Diskriminasi terhadap perempuan Indonesia nampak jelas antara lain dalam karya sastra Indonesia modern (Hatley, 2002, 2008). Sampai setelah tumbangny pemerintah Orde Baru pada tahun 1998, novel-novel Indonesia secara umum diwarnai oleh tokoh-tokoh perempuan yang pemalu, halus dan tergantung pada lelaki dan sebaliknya mengecam perempuan yang seksual, teremansipasi dan terpolitisasi³ (Hatley, 2008, p. 177). Pandangan semacam ini sangat erat kaitannya dengan ideologi Orde Baru yang menanamkan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tinggal di rumah, bukan perempuan yang bergerak atau bekerja di sektor publik. Perempuan Indonesia, dalam perspektif ideologis pemerintah Soeharto, adalah istri (pendamping suami) dan ibu (penerus keturunan dan pengurus rumahtangga):

Within the state ideology, there was no room for women as individuals. Instead, they were continually reminded of their kodrat (inherent nature), and particularly of their household and reproductive responsibility – to clean, cook, and bear children. ... Women were expected to be happy in the role of pendamping suami, 'standing at the side of their husbands' (Oey-Gardiner, 2002, p. 102).

Untuk menanamkan ideologi *housewifization* serta *ibuisme*³ tersebut, pemerintah kemudian membentuk *Dharma Wanita*³, yang merupakan organisasi istri pegawai negeri sipil (PNS), dan *Dharma Pertiwi*³, atau organisasi istri Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, untuk perempuan di tingkat akar

³*Housewifization* adalah pandangan yang melihat perempuan sebagai istri dan berperan hanya sebagai pendukung suami (Mies, 1986), sedangkan *ibuisme*³ suatu konsep yang diperkenalkan oleh Djayadinirat (dalam Blackburn, 2004)³ adalah ideologi yang mendefinisikan perempuan sebagai ibu serta mendorong perilaku untuk berperan dan berfungsi hanya sebagai ibu. Dua konsep ini dianggap yang memenjarakan kaum wanita untuk tetap membatasi diri untuk berkiprah hanya di sektor domestik dan memfungsikan dirinya sebagai orang ke dua dalam tatanan masyarakat.

rumpun serta untuk istri aparat pemerintah di semua level, pemerintah Orde Baru membentuk PKK (Marcoes, 2002; Oey-Gardiner, 2002).

Namun, seiring dengan semakin beratnya tekanan di sektor ekonomi dan sosial politik, ideologi pemerintah yang sepenuhnya mendomestikasi perempuan mulai bergeser, dan konsep peran ganda perempuan pun digantikan. Ide peran ganda perempuan ini dituangkan pemerintah dalam GBHN 1983 dan 1988, yang menyatakan bahwa perempuan berperan sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga serta sebagai pencari nafkah tambahan (Oey-Gardiner, 2002).

Dalam perkembangan berikutnya, yaitu dalam GBHN 1993, perempuan Indonesia diletakkan dalam posisi mitra sejajar pria dalam pembangunan. Namun, meski telah didudukkan sebagai mitra sejajar pria, perempuan tetap tidak lepas dari peran yang berkaitan dengan kodrat, harkat, serta martabat perempuan. Ini berarti bahwa pemerintah masih tetap berusaha mempertahankan pandangannya yang bersifat patriarkis, yang memosisikan perempuan sebagai istri (pendamping suami) serta ibu (mengasuh anak dan mengurus rumah tangga).

Perempuan Indonesia kembali menjadi pihak yang sangat menderita dalam detik-detik menjelang tumbangannya pemerintah Orde Baru. Ratusan perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual saat terjadi gelombang demonstrasi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, yang kemudian berakibat pada turunnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Selain itu, krisis ekonomi total ini melambungkan harga barang-barang kebutuhan pokok. Lagi-lagi perempuan Indonesia, sebagai pengurus rumah tangga, yang menanggung dampak paling besar. Sejumlah ibu rumah tangga, misalnya, kemudian mengorganisir diri memprotes harga susu yang kian tak terjangkau, padahal susu merupakan salah satu kebutuhan utama anak-anak mereka (Oey-Gardiner, 2002).

Runtuhnya rezim Soeharto menandai lahirnya era reformasi, era baru kehidupan sosial politik Indonesia. Reformasi memang sampai pada batas tertentu memberikan angin segar kepada perempuan Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih sejajar dengan laki-laki dalam berbagai sektor dan untuk berperan secara lebih aktif di ranah publik. Misalnya, untuk pertama kali dalam

sejarah Indonesia modern, seorang presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri, dipercaya memegang tampuk pimpinan. Meski sempat menuai banyak kecaman dan tentangan, Megawati akhirnya bisa menduduki kursi kepresidenan. Upaya menyetarakan kedudukan perempuan juga dilakukan di tingkat legislatif dengan mengalokasikan lebih banyak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk perempuan.

Namun, hal ini bukan berarti bahwa ketidaksetaraan gender sudah sepenuhnya hilang dari bumi Indonesia. Panca Dharma Wanita, misalnya, masih terus dikumandangkan hingga kini meski teks tersebut mengandung pernyataan yang mensubordinasi perempuan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data secara eksplisit. Ada dua metode yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena data bersumber pada dua hal yang berbeda. Data yang pertama diperoleh dari teks Panca Dharma Wanita, yang merupakan populasi sekaligus sampelnya. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *Critical Discourse Analysis*, dengan fokus untuk mengetahui ada atau tidaknya dominasi kekuasaan pada teks tersebut.

Data yang kedua adalah data pemahaman kader PKK terhadap teks Panca Dharma Wanita. Data ini akan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap kader PKK. Responden penelitian ini adalah para kader PKK di Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Semarang.

Sampel untuk pengumpulan data kedua adalah 15 responden yang mewakili 20% dari populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan kader PKK yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Misalnya, responden akan dipilih berdasarkan pekerjaan yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, atau pekerjaan suami yang berbeda. Data akan diperoleh melalui *in-depth interview* dengan tehnik *guided-*

conversation sehingga responden tidak akan merasa sedang diwawancarai. Dengan demikian, hasil percakapan yang lebih alami bisa diperoleh sebagai wujud data yang akurat.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pemahaman Kader PKK terhadap Panca Dharma Wanita

1. Wanita Sebagai Istri Pendamping Suami

Wanita sebagai istri pendamping suami adalah dharma pertama yang tercantum dalam Panca Dharma Wanita. Penekanan kalimat ini adalah peran utama wanita sebagai istri dengan penambahan makna sebagai pendamping suami yang dikaitkan dengan hubungan relasi mereka sebagai suami-istri.

Mengenai dharma yang pertama ini, semua kader setuju dengan maksud kalimat tersebut dengan alasan terutama yaitu *mendampingi suami* adalah kewajiban istri, *perempuan memang diciptakan untuk mendampingi suami*, dan *istri adalah bagian atau tulang rusuk suami*. Hanya ada dua orang kader ó dari 15 kader ó yang memiliki alasan yang lebih netral, yaitu dengan mengasosiasikan istri sebagai rekan dan teman bagi suami.

Sementara itu para kader PKK mengartikan kata *pendamping* dengan makna *menemani*, siap sedia, membantu, mengurus rumah tangga, dan pelengkap. Hanya dua kader memaknai kata *pendamping* sebagai *teman* serta *mitra*, sedangkan empat orang kader menyatakan bahwa kata *pendamping* bisa diganti dengan kata *pasangan* atau *partner*. Sedangkan 11 kader lainnya menyatakan bahwa kata *pendamping* lah kata yang paling tepat untuk memaknai fungsi wanita sebagai istri. Lebih jauh lagi, tidak ada kader yang setuju bila kalimat dharma pertama ini diubah menjadi *laki-laki sebagai suami pendamping istri*, dengan alasan utama: laki-laki adalah pemimpin keluarga.

2. Wanita Sebagai Ibu Penerus Keturunan

Dharma kedua dari Panca Dharma Wanita menempatkan perempuan

sebagai ibu dengan tambahan fungsi sebagai penerus keturunan. Mengenai dharma ini, hanya satu kader merasa tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan adalah penerus keturunan, karena penerus keturunan, menurutnya, adalah suami dan istri. Sementara itu, kader-kader PKK yang lain menyetujui pernyataan dharma kedua ini; sebagian besar beralasan bahwa secara kodrat, meneruskan keturunan merupakan kewajiban perempuan.

Para kader PKK memaknai frasa "penerus keturunan" dengan makna "melahirkan, mendidik, suatu kebanggaan", serta "memberi keturunan bagi suami". Sedangkan kata "ibu" dimaknai dengan penempatan perempuan pada kodratnya, yaitu perempuan sebagai panutan anak, mengasuh anak, serta melayani kebutuhan suami dan anak. Selain itu, sebagian besar kader menyatakan bahwa peran perempuan sebagai ibu bukanlah sebuah pilihan melainkan suatu keharusan. Oleh sebab itu, para kader ini menyatakan bahwa bila seorang perempuan tidak bisa mengandung dan melahirkan anak, maka ia dapat melakukan adopsi. Dengan kata lain, mereka harus tetap berfungsi mengasuh anak, meskipun mungkin tidak dari rahimnya sendiri. Sebagian besar kader juga berkomentar negatif terhadap perempuan yang tidak bersedia mengandung dan melahirkan anak. Salah seorang kader, misalnya, mengatakan bahwa perempuan yang tidak bersedia memiliki anak merupakan "korban globalisasi negatif".

3. Wanita Sebagai Pengurus Rumah Tangga

Dharma ketiga dari Panca Dharma Wanita menempatkan wanita sebagai pengurus rumah tangga. Mengenai dharma ketiga ini semua kader PKK setuju bahwa perempuan-lah yang bertugas mengurus rumah tangga, dan suami hanya diposisikan untuk membantu. Bahkan jika istri bekerja sekalipun, istri tetap wajib mengurus rumah tangga, dan suami tetap diposisikan untuk membantu saja, tidak bias berlaku sebaliknya.

"Mengurus rumah tangga" di sini dipahami oleh kader PKK sebagai "mengurus keuangan, memasak, mengasuh dan mendidik anak, menata rumah, melayani suami, serta "mencari nafkah tambahan".

4. Wanita Sebagai Pencari Nafkah Tambahan

Dharma keempat dari Panca Dharma Wanita menempatkan wanita sebagai pencari nafkah tambahan, dengan penegasan makna pada kata *ṭambahanō* sehingga bernegasi dengan kata *ṭutamaō*. Mengenai Panca Dharma keempat ini, para kader PKK memiliki pendapat yang relatif tidak seragam. Salah seorang kader tidak sepakat dengan ide *ōwanita sebagai pencari nafkah tambahanō*. Menurut pendapatnya, seorang istri bisa saja memiliki penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan suami, sehingga frase *ōpencari nafkah tambahanō* menjadi kurang tepat. Sebaliknya, seorang kader menolak dharma keempat ini sebab seorang istri tidak perlu mencari nafkah, dan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya tanggung-jawab suami (laki-laki).

Namun demikian, sebagian besar menyetujui dharma keempat ini, dengan penekanan bahwa seorang perempuan mesti mendapat izin suami untuk bekerja di luar rumah, dan memiliki keahlian atau kemampuan untuk menyelesaikan tanggung-jawab pekerjaan tersebut.

ōPencari nafkah tambahanō diartikan oleh para kader PKK dengan makna *ōmembantu suamiō*, bukan sebagai pencari nafkah utama. Namun, pada konteks penghasilan suami kurang atau tidak memadai, maka sebagian kader PKK berpendapat bahwa istri wajib membantu suami, dan sebagian lagi berpandangan bahwa istri tidak wajib membantu suami karena mencari nafkah bukanlah tanggung-jawab utama seorang istri.

Sementara itu, dalam konteks seorang perempuan bekerja untuk eksistensi diri, para kader PKK berpendapat bahwa istri tetap harus mendapat izin suami untuk bekerja. Apabila penghasilan istri lebih besar daripada pendapatan suami, maka istri tetap wajib menghormati suami, tidak boleh sombong atau merasa lebih tinggi daripada suaminya. Meskipun penghasilan istri lebih besar, semua kader PKK menolak bila kemudian suami disebut sebagai pencari nafkah tambahan.

5. Wanita Sebagai Anggota Warga Negara

Dharma terakhir dari Panca Dharma Wanita adalah wanita sebagai anggota warga negara. Mengenai dharma ini, semua kader menyetujui pernyataan bahwa

perempuan merupakan bagian dari warga negara, meskipun pemaknaan anggota warga negara ini difahami dalam konteks yang sedikit lebih sempit yakni dalam kaitannya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia), yang berhak mendapat kartu identitas warga negara seperti KTP dan KK, dan yang bisa memberikan suaranya, baik dalam pemilu maupun sebagai saksi.

Pemaknaan anggota warga negara juga dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap negara dan peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam kaitannya dengan peran yang sama antara laki-laki dan wanita, tiga orang kader secara eksplisit menyatakan bahwa dalam dharma kelima ini terkandung persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki serta wanita Indonesia sebagai anggota warga negara, dan sebagian besar kader PKK juga menyatakan hal senada meskipun tidak secara eksplisit.

4.2. Pemahaman terhadap Urutan Panca Dharma Wanita

Hampir semua kader PKK sepakat dengan urutan Panca dharma wanita tersebut dengan alasan utama: õmulai dari lingkup yang paling kecilö, õsesuai dengan kodrat penciptaan wanitaö, õsesuai dengan urutan kewajiban utamaö, õdi Indonesia, derajat wanita lebih rendah dari priaö, dan õkondisinya sudah demikian dari dulu sampai sekarangö.

Namun, ada salah satu kader yang memiliki pandangan berbeda. Kader ini berpendapat bahwa õwanita sebagai anggota warga negaraö seharusnya diletakkan dalam urutan pertama.

4.3. Pembahasan Pemahaman Kader PKK dalam CDA

1. Analisis Umum

Secara umum ada tiga hal yang menarik yang dapat di telaah dari konsep Panca Dharma Wanita ini, yaitu penggunaan kata õDharmaö, penerapan panca dharma Wanita sebagai ideology PKK, dan penggunaan kata Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai ñnamaö untuk organisasi PKK

Yang pertama adalah pemaknaan kata ñdharmaö. Secara makna kata

õdharmaö memiliki makna yang terhormat karena kata tersebut mengandung makna pengabdian yang agung secara *symbolic*. Dengan demikian kata dharma bermakna mengabdikan tetapi tidak pada konteks sebagai abdi tetapi lebih pada konteks untuk memberi sehingga akan membuahkan kebaikan. Dengan kata lain, dengan berdharma berarti si pendharma memberikan sesuatu yang dia miliki dengan penuh keikhlasan dan hasil dari apa yang dia lakukan tersebut akan memberi kebaikan baik bagi orang lain maupun untuk si pendharma itu sendiri. Penggunaan kata dharma dengan konotasi makna yang positive tersebut lebih dipilih dibandingkan dengan kata peran atau fungsi yang semata-mata hanya memberi makna tugas terkait posisi. Karena makna kata dharma yang positive tersebut, maka penggunaannya juga dapat diterima dengan lebih baik, karena mengisyaratkan posisi kader PKK yang justru lebih positive.

Yang kedua adalah penerapan Panca Dharma Wanita sebagai ideologi dasar PKK. Secara historis, PKK terbentuk sebagai sebuah wadah kegiatan wanita yang ide dasarnya berasal dari organisasi dharma wanita/dharma pertiwi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dharma wanita dan dharma pertiwi adalah organisasi wanita pendukung karir suami; dharma wanita adalah organisasi istri pegawai negeri, dan dharma pertiwi adalah organisasi istri TNI. Dua organisasi tersebut mendasarkan fungsi dan peran anggotanya terutama pada sektor domestik; untuk memastikan bahwa para suami tidak perlu memikirkan apalagi menangani urusan domestik. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan mereka yang berbasis kepentingan domestic seperti misalnya kursus memasak, atau merangkai bunga. Secara ideologis, selama masa Orde Baru, dua organisasi tersebut cukup berpengaruh dalam mengendalikan PNS dan TNI beserta keluarganya untuk senantiasa mendukung ideologi dan pemikiran Orde Baru.

Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru membentuk PKK sebagai organisasi yang bersifat memobilisasi massa karena PKK dimaksudkan sebagai organisasi yang beranggotakan setiap istri dari setiap keluarga. PKK terbentuk mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, hingga tingkat nasional. Dengan demikian,

semua istri akan menjadi anggota PKK, paling tidak pada tingkat RT ó ada semacam seruan untuk memastikan bahwa setiap istri aktif mengikuti kegiatan PKK tingkat RT. Kegiatan utama dalam PKK bersifat senada dengan kegiatan pada dharma wanita atau dharma pertiwi; dan oleh karenanya ideology yang dijadikan dasar kegiatan PKK adalah Panca Dharma Wanita, dengan memfokuskan fungsi dan peran wanita pada sektor domestik, yakni sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga ó dengan kata lain mempertahankan dominansi kekuasaan suami. Satu hal yang berbeda hanyalah PKK sebenarnya bukan organisasi istri pendukung karir suami sehingga penggunaan Panca Dharma Wanita sebagai landasan ideologinya menjadi seperti dipaksakan karena kehidupan yang dialami para wanita anggota PKK ini tentunya tidak sama dengan kehidupan yang dijalani oleh para istri PNS atau TNI. Tentunya penggunaan Panca Dharma sebagai ideologi PKK bukanlah tanpa alasan; mengingat keberhasilan dharma wanita dan dharma pertiwi dalam mendukung Orde baru, maka PKK pun juga diarahkan untuk tujuan serupa. Karena keanggotaan PKK jauh lebih luas, maka pengaruh yang diharapkan tentunya juga akan jauh lebih luas.

Yang ketiga, PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dari namanya, PKK diyakini bukanlah merupakan sebuah organisasi. Ia di maknakan sebagai suatu wadah kegiatan para wanita dengan suatu tujuan untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk dua hal yakni pemberdayaan dan kesejahteraan; bahwa apapun bentuk kegiatannya, itu merupakan wujud pemberdayaan perempuan. Ide dasarnya yaitu pemberdayaan wanita, sebenarnya adalah ide yang bagus, dengan kata lain, bahwa dengan PKK ada kesadaran bahwa wanita dianggap belumlah berdaya dan ada kesadaran untuk membuat mereka lebih berdaya. Hanya saja pemberdayaan yang dimaksudkan adalah demi kesejahteraan wanita pada batas keluarga. Dengan demikian, tetap saja ruang gerak pemberdayaan itu diarahkan ke ranah domestik. Selain itu, penggunaan kata kesejahteraan juga mengimplikasikan bahwa pemberdayaan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan keluarga, dan hanya dengan pemberdayaan wanita pada ranah

keluarga lah bias diraih kesejahteraan tersebut. Dengan pemikiran tersebut, maka Panca Dharma Wanita dijadikan landasan kegiatannya.

2. Domestifikasi Perempuan Indonesia

Penggunaan Panca Dharma Wanita sebagai landasan gerak PKK merupakan bukti terdomestifikasinya perempuan Indonesia yang diperjelas dengan penguatan butir-butir dharma yang mengharuskan wanita untuk berperan secara domestik terlebih dahulu, barulah diperbolehkan untuk berperan di masyarakat. Hal ini tercermin dari dharma yang secara berturut-turut menyebut peran wanita sebagai istri, ibu, pengurus rumah tangga, pencari nafkah tambahan, dan yang terakhir adalah sebagai warga masyarakat. Padahal, sebagai manusia seharusnya wanita dikenal terlebih dulu sebagai warga masyarakat, bahkan hak dan kewajiban wanita sebagai anggota warga negara sudah ada sebelum wanita menjadi istri. Pengurutan yang demikian tersebut mengandung makna bahwa begitu wanita berumah tangga, maka peran terutama mereka bukan lagi sebagai anggota masyarakat melainkan sebagai istri, ibu (jika sudah memiliki anak dan dinormakan untuk punya anak), dan pengurus rumah tangga; dengan kata lain ideology *Housewifization* (Mies, 1986) dan *Ibuisism* (Djayadiningrat, 2004) ditanamkan. Sementara itu peran lain yang terkait dengan eksistensi diri wanita sebagai manusia diakui hanya selama ketiga peran yang sebelumnya telah dilakukan dengan baik itu pun juga dengan catatan, harus sejin suami dan tetap menghormati suami. Bahkan, wanita yang mandiri dan kritis memandang peran dan posisinya justru dipertanyakan (Hatley, 2002: 130) karena hal tersebut bertentangan dengan ideology gender yang konservatif dan *family-centered* yang menjadi dasar ideology PKK.

3. Dominasi Power dalam Kata Kunci Panca Dharma Wanita

Ada beberapa kata kunci yang menunjukkan dominasi power laki-laki dalam Panca Dharma Wanita, yang menunjukkan tingginya budaya patriarkhi dalam masyarakat Indonesia. Kata-kata tersebut diantaranya adalah penggunaan kata wanita dan bukannya perempuan. Kata wanita diadopsi dari Bahasa Jawa

yang seringkali di artikan dari susunan kata *wani di tata* yang berarti berani atau harus mau untuk diatur.

Kata kunci yang kedua adalah penggunaan kata pendamping dalam Dharma pertama; wanita sebagai istri pendamping suami. Secara harfiah, kata pendamping berarti menemani, atau menyertai dekat-dekat. Kata pendamping juga mengimplikasikan suatu maksud tambahan; bahwa seorang pendamping bukanlah pemegang peranan sentral; ia bukanlah yang menjadi pelaku utamanya; ia hanya ada manakala yang dia damping ada. Dengan demikian, sebagai seorang pendamping, istri bukanlah pelaku utama dalam suatu keluarga. Keberadaannya dianggap bergantung pada keberadaan suami, istri bukanlah penentu peran, dia hanyalah mendampingi suami menentukan kebijakan keluarga. Dengan kata lain posisi seorang istri ó wanita ó diletakkan dibawah posisi suami, dan keberadaannya hanya akan diakui dalam kaitannya dengan keberadaan suami.

Kata kunci berikutnya adalah kata ibu dan frasa penerus keturunan dalam dharma wanita adalah ibu penerus keturunan. Kata ibu sebenarnya bermakna luas; setiap wanita dewasa bisa disebut dengan ibu, tetapi dengan menambahkan frasa penerus keturunan, maka kata ibu disempitkan maknanya hanya sebagai ibu secara biologis, yakni ibu yang mengandung dan melahirkan anaknya. Padahal, pada konteks biologis tidak semua wanita bias menjadi ibu. Menjadi Ibu sebenarnya adalah gelar pilihan dari sekian banyak gelar yang bias dimiliki wanita. Frasa penerus keturunan yang dibebankan pada kata ibu juga mengandung makna pembebanan fungsi meneruskan keturunan pada wanita, padahal jelas diketahui bahwa seorang wanita tidaklah mungkin bisa meneruskan keturunan tanpa peran laki-laki. Sehingga jika pasangan suami istri belum dikaruniai putra maka wanita yang akan secara psikologis terbebani. Mereka lah yang akan mendapat stigma tidak bisa memberikan keturunan pada suami, meskipun secara medis wanita tersebut terbukti tidak memiliki gangguan reproduksi.

Kata kunci yang lain adalah pada kata pengurus dalam dharma ketiga; wanita sebagai pengurus rumah tangga. Kata pengurus memberikan makna pemberian tanggung jawab. Pada dharma sebelumnya wanita tidak dimaknai sebagai seseorang yang bisa diberi beban tanggung jawab. Dengan kata lain,

wanita tidak dianggap mampu untuk diberi beban tanggung jawab. Pada dharma ketiga ini wanita diberi beban tanggung jawab, tetapi perlu dicatat bahwa beban yang diberikan dibatasi pada sector domestic, dengan mempertegas bahwa yang diurusnya adalah urusan rumah tangga.

Kata kunci yang terakhir adalah kata tambahan pada dharma keempat; wanita sebagai pencari nafkah tambahan. Penambahan kata tambahan pada kalimat itu menunjuk peran wanita yang ter-subordinate, bahwa apa yang dilakukan wanita untuk menafkahi keluarga adalah bersifat pelengkap saja. Implikasi lain dari kata tambahan itu adalah, jika memang sudah mencukupi maka tidak perlu ada tambahan lagi. Hal ini yang kemudian menjadi legitimasi untuk menafikkan kemauan wanita untuk bekerja disektor publik, baik dibutuhkan atau tidak, karena memang existensi wanita disektor itu tidak diakui.

5. KESIMPULAN

Panca Dharma Wanita merupakan salah satu *text* yang senantiasa dilafazkan oleh para kader PKK dalam hamper setiap kegiatan mereka. Teks Panca Dharma ini berisikan semacam pedoman mengenai peran yang seharusnya dijalani wanita dengan mengurutkannya dari dharma yang bersifat domestic ke dharma yang bersifat publik. Dharma ó dharma tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan merupakan peran penunjang dari peran suami, dengan kata lain, laki-laki lah yang menjadi tokoh utama dalam sebuah rumah tangga dan wanita hanyalah menjadi pendamping saja.

Konsep bahwa wanita hanyalah pendamping dan bukan pelaku utama dalam keluarga, dan oleh karenanya menjadikan posisi mereka tersubordinasi sepertinya tidak disadari oleh kader PKK dalam penelitian ini, meskipun mereka tahu persis posisi, peran, dan fungsi mereka dalam keluarga. Posisi, peran, dan fungsi yang tersubordinasi tersebut dianggap sebagai hal yang memang sudah seharusnya karena memang mereka menganggap laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dengan dimasukkannya Panca dharma wanita sebagai ideologi

kegiatan massa mereka, maka anggapan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi itu menjadi semakin kuat, karena penggunaan kata dharma tersebut member konotasi yang positif.

Disamping itu, ada beberapa kata kunci yang menunjukkan peran wanita yang ter subordinasi dalam Panca Dharma wanita yaitu kata pendamping, penerus keturunan, pengurus rumah tangga, dan pencari nafkah tambahan

DAFTAR PUSTAKA

Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cameron, D. (2007). Book Review: Feminist critical discourse analysis. *Language in Society*, 36(1), 111-115.

Ekoadyo, A. S. (2006). Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dalam Penelitian Media Arsitektur. *Jurnal Itenas*, 2(10), 51-57.

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. Singapore: Longman.

Fairclough, N. (2001). *Language and Power* (2nd ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.

Hatley, B. (2002). Literature, Mythology and Regime Change: Some Observations on Recent Indonesian Women's Writing. In K. Robinson & S. Bessel (Eds.), *Women in Indonesia: Equity and Development* (pp. 130-143). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Hatley, B. (2008). Postkolonialitas dan Perempuan Indonesia dalam Sastra Indonesia Modern (K. Soebagyo & M. Soesman, Trans.). In K. Foulcher & T. Day (Eds.), *Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial* (pp. 175-225). Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.

Marcoes, L. (2002). Women's Grassroots Movements in Indonesia: A Case Study of the PKK and Islamic Women's Organisations. In K. Robinson & S. Bessel (Eds.), *Women in Indonesia: Equity and Development* (pp. 187-197). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Mies, M. (1986). *Patriarchy and Capital Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London: Zed Books.

- Oey-Gardiner, M. (2002). And the winner is ... Indonesian Women in Public Life. In K. Robinson & S. Bessel (Eds.), *Women in Indonesia: Equity and Development* (pp. 100-112). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Philips, N., & Hardy, C. (2002). *Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction* (Vol. 50). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rahayu, P. R. (2004). Militerisme dan Ideologi Konco Wingking. Retrieved from <http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/opini.htm>
- Rahimi, F., & Riasati, M. J. (2011). Critical Discourse Analysis: Scrutinizing Ideologically - Driven Discourses. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(16), 107-112.
- van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse and Society*, 4(2), 249-283.
- van Dijk, T. A. (1998). Critical Discourse Analysis. Retrieved from <http://www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm>
- Wodak, R. (1991). Turning the Tables: Anti-Semitic Discourse in Post War Austria. *Discourse and Society*, 2(1), 63-83.